

## DAFTAR ISI

### Mengelola Perbatasan Negara

1. Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia  
*Iva Rachmawati dan Fauzan* 95-109
2. Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Berbasis *Connectivity*  
*Saptopo B Ilkodar* 110-124
3. Penguatan *Human Security* sebagai Strategi Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia  
*Yohanes Sanak* 125-135
4. Keamanan Energi dan Hubungan Kerja Sama Cina-Jepang  
*Uni Wahyuni Sagena, Ravichandran Moorthy* 136-152
5. Signifikansi Desentralisasi Kehutanan Bagi Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah  
*Emilianus Yakob Sese Tolo* 153-168
6. Menuju Demokrasi Rasional:  
Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik  
*Antonius Galih Prasetyo* 169-185

## Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik

**Antonius Galih Prasetyo**

Universitas Gadjah Mada, Jl Sosio Yustisia Yogyakarta  
Email: antgalihprasetyo@gmail.com

### Abstract

As a concept widely employed to promote the deeper and more radical democracy within the framework of deliberative democracy, public sphere as formulated by Jürgen Habermas in his two books, *The Structural Transformation of Public Sphere* and *Between Facts and Norms*, acts as a crucial theory to investigate and assess the degree of publicness in today's democracy discourse. This paper aims to elaborate the concept of public sphere as written in those two books. By comparing the content of each book, this paper also classifies the similarity and differences between the concept of public sphere written in those two texts.

### Key Words:

public sphere; deliberative democracy; discourse; Jürgen Habermas

### Abstraksi

Sebagai konsep yang digunakan secara luas untuk mempromosikan demokrasi yang lebih dalam dan radikal dalam kerangka demokrasi deliberatif, ruang publik sebagaimana diformulasikan Jürgen Habermas dalam dua bukunya, *Transformasi Struktural Ruang Publik* dan *Antara Fakta dan Norma*, berperan sebagai teori yang krusial untuk menyelidiki dan menilai derajat kepublikan dari diskursus demokrasi hari ini. Paper ini bertujuan untuk mengelaborasi konsep ruang publik yang ditulis dalam dua buku tersebut. Dengan membandingkan isi dari setiap buku, paper ini juga mengklasifikasikan persamaan dan perbedaan di antara konsep ruang publik yang ditulis dalam dua teks tersebut.

### Kata Kunci:

ruang publik; demokrasi deliberatif; diskursus; Jürgen Habermas

### Pengantar

Dalam diskursus tentang demokrasi dan politik kontemporer, konsep ruang publik menempati peranan yang cukup sentral. Pada umumnya, konsep tersebut diartikulasikan sebagai wacana untuk menyerukan mengenai pentingnya pelembagaan suatu relasi sosial yang khas dalam rangka pendalaman dan radikalisasi

demokrasi. Ruang publik muncul sebagai prasyarat yang harus dimiliki dan dikembangkan dalam negara yang menganut sistem demokrasi demi menjamin tercapainya ideal-ideal yang terkandung dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang demokratis.

Salah satu pemikir yang mengembangkan konsep tentang ruang publik

secara cukup ekstensif adalah Jürgen Habermas. Dalam korpus pemikirannya secara keseluruhan, konsep ruang publik menduduki tempat yang krusial karena diskusi tentangnya dilakukan secara otonom dan terfokus, bukan sekadar menjadi elemen konseptual sampingan untuk melegitimasi suatu premis teoretis yang lebih luas. Hampir setiap wacana tentang ruang publik selalu merujuk kepada pemikiran Habermas karena pemikirannya memang berhasil dalam mendalami dan meneroka berbagai aspek yang melekat dalam ruang publik. Perspektif yang digunakannya untuk menganalisis sekaligus mengkritisi ruang publik merentang ke dalam berbagai dimensi yang luas sehingga kekayaan analitis yang termuat dalam konsepnya tentang ruang publik menjadi suatu hal yang menantang untuk dikaji.

Tulisan ini akan mendiskusikan konsep ruang publik menurut Jürgen Habermas. Setelah dimulai dengan bagian pengantar, tulisan akan dilanjutkan dengan bagian pembahasan yang berturut-turut akan membicarakan tiga hal. Pertama, pemaparan mengenai pengertian dari konsep ruang publik dengan beragam makna atasnya yang muncul melalui berbagai perspektif dan disiplin ilmu. Kedua, penjelasan Habermas mengenai ruang publik borjuis sebagaimana dituliskan dalam buku *The Structural Transformation of Public Sphere* (selanjutnya disingkat ST). Ketiga, konsep ruang publik dalam kerangka demokrasi deliberatif yang muncul dalam teks *Between Facts and Norms* (selanjutnya disingkat BFN). Tulisan akan ditutup dengan ulasan mengenai identifikasi persamaan sekaligus perbedaan dari kedua konsep Habermas tentang ruang publik dan sedikit catatan kritis atasnya.

### Makna Ruang Publik

Suatu perbincangan atas suatu konsep perlu terlebih dahulu melakukan klarifikasi

untuk menjernihkan suatu pokok soal sekaligus menyamakan persepsi dan pengertian atasnya. Dalam upaya ini, disadari bahwa melakukan klarifikasi atas konsep ruang publik merupakan suatu hal yang tidak mudah mengingat adanya keberagaman makna dan pengertian yang luas dari konsep tersebut.

Karena keberagaman makna tersebut, maka istilah ruang publik seringkali digunakan secara longgar. Makna atasnya sangat dipengaruhi oleh konteks dan ilmu yang sedang mengartikulusikannya. Misalnya, dalam ilmu arsitektur dan planologi, ruang publik dipahami dalam pengertian teknis-arsitektural, dengan taman, plaza, dan ruang terbuka sebagai contoh dari apa yang disebut ruang publik. Dalam konteks dunia digital internet, ruang publik adalah *cyberspace* tempat interaksi maya terjadi. Bagi pengkaji dan aktivis media, ruang publik adalah perusahaan penyiaran yang disponsori oleh pemerintah. Adapun dalam kesadaran feminis, ruang publik adalah arena sosial tempat aneka hukum, kontrak, dan persetujuan yang mengeksklusi wanita dibuat (Lofland, 2007: 3720).

Herry-Priyono (2010: 372-374) melakukan survei yang komprehensif mengenai variasi makna dari ruang publik. Dalam abstraksinya, keragaman arti ruang publik terkristalkan ke dalam enam gugus pengertian, di antaranya modal sosial (jaringan *trust* dan resiprositas), pelayanan publik (keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan, lingkungan hidup, dll.), barang publik (kebutuhan umum sebagai antisipasi kegagalan pasar), budaya publik (bahasa, sikap, selera, cara pikir *civility*), tempat publik (ruang/tempat bertemu untuk debat dan diskusi), dan interrelasi antara pasar, keluarga, pemerintah, dan kelompok independen yang membentuk sosialitas masyarakat.

Pada Habermas, ruang publik dalam tulisan-tulisannya merupakan ruang publik yang ditelaah dari perspektif politik. Selain Habermas, ada banyak pemikir kontemporer yang meneorikan mengenai ruang publik dalam perspektif politik (Arendt, 1958; Fraser, 1992; Keane, 2000; Putnam, 2001; Taylor, 2002). Pada dasarnya, kesemuanya berbagi pandangan yang sama bahwa ruang publik memainkan peran yang vital dalam penguatan demokrasi, yakni sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai intermediari antara negara dengan individu privat. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan secara formal dikontrol dan diperiksa secara saksama melalui nalar publik.

Ruang publik politis selalu mengasumsikan mengenai perbedaan antara ruang publik dengan ruang privat, dua kategori yang telah muncul pertama kali dalam teks *Politics* (1992) karya Aristoteles. Ruang publik menjadi mungkin untuk ada dan dipahami karena ada ruang privat. Konsep ruang publik Habermas juga berdiri di atas logika ini. Menurut Rabotnikov, distingsi antara ruang publik dengan ruang privat biasanya diidentifikasi atas dasar tiga bipolaritas: masyarakat versus individu, keterlihatan versus penyembunyian, dan keterbukaan versus tertutupan (dikutip dalam Susen, 2011: 40).

Bagaimanapun, ini merupakan permainan wacana yang pelik, semenjak apa yang disebut dengan publik dengan privat itu sendiri tidaklah pasti. Pemahaman atas masing-masing ruang tersebut tidaklah jelas dengan sendirinya (*self-evident*) karena setiap upaya pembatasan pada dasarnya merupakan konstruksi sosial yang memuat kepentingan dan asumsi tertentu. Doktrin kaum feminis tentang *the private is political* misalnya, merupakan contoh dari wacana yang berusaha menjangkirkan keterberian sosial dari persepsi (patriarkis) tentang perbedaan kedua ruang.

Ruang publik hendaknya tidak dipahami secara utopis sebagai ruang yang kedap dari pengaruh ruang-ruang lain yang ada dalam masyarakat luas, termasuk pengaruh dari negara (Calhoun, 2010). Selain itu, dia juga sebaiknya tidak dimengerti secara sempit sebagai ruang spasio-fisikal tertentu yang memiliki batas serta wujud yang jelas. Pada hakikatnya, makna dari ruang publik selalu terombang-ambing dalam tarikan antara pandangan yang melihatnya sebagai suatu ruang fisik-konkret tertentu dengan pandangan yang melihatnya sebagai sesuatu yang mentransendensi ruang (Smith dan Low, 2006: 3). Ketegangan, atau lebih tepatnya dialektika, antara dimensi keruangan dan dimensi non-keruangan dari ruang publik itulah yang terdapat dalam pemikiran Habermas tentang ruang publik. Pemikiran Habermas tentang ruang publik sendiri dapat dipilah menjadi dua, yaitu versi yang tertulis dalam buku ST dan satunya lagi dalam BFN.<sup>1</sup> Apabila teks pertama melihat ruang publik dalam lensa historis-sosiologis, maka teks yang kedua menempatkan ruang publik secara lebih abstrak dalam kerangka filsafat politik. Berikut akan dipaparkan pemikiran Habermas tentang ruang publik dalam dua periode kepenulisan tersebut.

### **“The Structural Transformation of Public Sphere”: Ruang Publik Borjuis**

ST mengulas dua tema pokok, yaitu asal mula ruang publik borjuis dan analisis terhadap perubahan struktural ruang publik di zaman modern, lebih tepatnya di abad ke-18 dan 19. Apa yang membuat Habermas tertarik kepada ide tentang ruang publik adalah potensinya sebagai fondasi dari

---

<sup>1</sup> Sesungguhnya, tema ruang publik dalam konteks yang lain, yakni problem tentang diskursus agama dalam ruang publik, juga menjadi perhatian Habermas dalam beberapa tulisan, misalnya “Religion in the Public Sphere” (2008). Namun, tulisan ini tidak akan membahas hal tersebut.

masyarakat yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip demokratis (Johnson, 2006: 19).

Secara historis ruang publik muncul pertama kali pada abad ke-17 di Eropa di mana kemunculannya berbarengan dengan berkembangnya kapitalisme.<sup>2</sup> Pada era proto kapitalisme mulai muncul kelas baru dalam masyarakat, yaitu kelas borjuis. Mulanya mereka hanya melakukan usaha perdagangan biasa lalu lambat laun mereka memulai mode produksi kapitalis. Dengan latar ini, ruang publik seminal yang muncul pada era tersebut dengan demikian merupakan ruang publik borjuis, yaitu ruang publik yang ditempati oleh kelas komersial atau pedagang dan profesional.

Distingsi antara publik dan privat merupakan konstruksi yang melandasi munculnya ruang publik. Kepublikan direpresentasikan oleh negara yang mengatur masyarakat sedangkan kepriwatan direpresentasikan oleh masyarakat sipil yang otonom. Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat sipil (kaum borjuis) mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara, yang dirumuskan berupa pertanyaan tentang sudahkah negara melayani kepentingan publik. Ruang publik borjuis dengan demikian merupakan ruang dari orang-orang privat yang berkumpul bersama sebagai publik. Negara diajak berdebat tentang isu-isu yang pada dasarnya bersifat privat namun memiliki relevansi publik, seperti isu pertukaran komoditas dan kerja sosial (Habermas, 1989: 27). Di sini, terdapat dinamika unik yang mementahkan pandangan yang mengontraskan secara keras antara yang publik dengan yang privat. Ruang publik borjuis mampu berfungsi sebagai "mediasi dialektis" antara

ranah privat dengan ranah publik (McKeon, 2004: 274).

Sifat kepublikan dalam ruang publik borjuis ini berbeda dengan kepublikan yang ada pada masa pra-modern di zaman feodalisme. Pada masa feodalisme, raja dan kaum aristokrat menampilkan dan merepresentasikan dirinya di depan publik bukan sebagai invitasi untuk berkomunikasi atau berdebat, melainkan semata-mata untuk unjuk kekuatan secara retorik. Ruang publik pada masa feodal ini bukanlah ruang publik yang murni karena telah diimbui dengan intrik pemanggungan dan penataan. Ketika kemudian kelas borjuis mulai meningkat jumlahnya, posisi tawar mereka meningkat. Salah satu aspek sosial terpenting, ekonomi, kini menjadi wilayah pengurusan mereka dan bukan lagi negara atau kerajaan.

Dengan semakin masif dan intensifnya produksi dan distribusi, maka muncul kebutuhan akan prediktabilitas, informasi, dan berita yang berhubungan dengan perdagangan. Pedagang dan produsen membutuhkan informasi tentang infrastruktur, harga, pajak, dan sebagainya. Jalur perdagangan sendiri sebenarnya telah menyediakan saluran komunikasi, akan tetapi hal ini kemudian dipermudah dengan kehadiran surat kabar. Selain memberikan informasi yang terkait dengan pasar, surat kabar juga memberikan informasi-informasi non-ekonomis (Habermas, 1989: 14-26).

Untuk mempertahankan kepentingan mereka, khususnya kepentingan ekonomi, maka kemudian dibentuklah forum-forum publik seperti warung kopi, klub, salon, dan *table societies*. Pertemuan-pertemuan semacam inilah yang membentuk basis institusional dari ruang publik borjuis. Pembentukan forum-forum tersebut dapat dimungkinkan karena pada abad ke-18 telah dikenalkan hak-hak sipil yang menjamin kebebasan berasosiasi dan berespres. Demikian juga kebebasan pers

<sup>2</sup> Ini berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hannah Arendt (1958), yang percaya bahwa ruang publik muncul pertama kali pada masa Yunani kuno sebagai pasar (*agora*) yang tersituasikan dalam negara kota (*polis*).

telah muncul pada saat itu. Di dalam ruang publik isu-isu penting yang terentang dalam spektrum yang luas dibicarakan oleh kaum borjuis, tidak hanya terbatas kepada isu-isu ekonomi.

Pada mulanya ruang publik borjuis merupakan ruang publik yang bersifat literer. Ini terkait dengan fakta bahwa keluarga borjuis merupakan konsumen karya sastra sekaligus sumber dari relasi dan peristiwa yang digambarkan dalam karya sastra tersebut. Karya sastra yang banyak dimuat dalam buku, jurnal, dan berkala merupakan cermin di mana kelas borjuis merefleksikan norma-norma kehidupannya dan posisinya di dalam masyarakat. Dalam konteksnya yang lebih luas, ruang publik literer ini juga berkaitan dengan perkembangan seni yang membunyah pada abad ke-18, teristimewa seni dalam bentuk novel. Novel sendiri pada dasarnya berasal dari surat. Melalui surat, kaum borjuis tidak hanya merawikan suatu kisah tetapi lebih-lebih mengekspresikan dirinya melalui tulisan. Sama seperti fungsi yang diemban ruang publik, surat dalam caranya sendiri mampu menjadi jembatan antara yang publik dengan yang privat. Ekspresi diri via surat bukan semata perkara keterampilan menulis secara elegan dan sugestif, tetapi lebih pada perkara bagaimana mengartikulasikan secara publik emosi-dalam seseorang (Habermas, 1989: 48-51).

Apa yang krusial dari ruang publik literer ini adalah munculnya kepercayaan bahwa karya sastra pada masa itu mendapatkan otoritasnya dari pembaca. Ini berbeda dengan karya sastra era feodal di mana penerimaan dan konsiderasi atas sebuah karya sastra didasarkan kepada dimensi religius dan monarkis. Dalam ruang publik literer, daya rasa selera seseorang kemudian diperdebatkan dan dijustifikasi secara publik. Konten karya sastra berikut nilai-nilai yang dikandungnya menjadi

subjek perdebatan. Semua orang yang mengakses ruang publik literer diasumsikan mempunyai selera dan selera tersebut perlu dipertanggungjawabkan secara publik. Pada titik ini mulai muncul ide tentang kritik, atau lebih tepatnya, kritik yang bercorak rasional (Thomassen, 2010: 38). Pada perkembangannya kemudian, ruang publik literer meluaskan ranah perbincangannya menjadi tidak hanya tulisan-tulisan bergenre fiksi tetapi juga esai-esai yang biasa dimuat dalam berkala. Dari situ, kemudian didapatkan stimulasi untuk berdiskusi kepada hal-hal lain yang lebih luas dalam dunia sosial-politik. Sampai pada tahapan ini maka ruang publik juga mengalami diferensiasi menjadi tak lagi hanya bersifat literer. Ruang publik mendiskusikan segala hal yang mungkin dicapai solusi rasionalnya melalui debat kritis.

Dalam hubungannya dengan negara, ruang publik berperan sebagai intermediari antara negara dan kaum borjuis. Melalui artikulasi opini yang dicuatkan di dalam ruang publik semacam itu, tersimpan misi agar negara lebih responsif kepada ekspresi kebutuhan dan kepentingan kaum borjuis dalam opini publik (Habermas, 1989: 14-26). Pada mulanya, opini yang disuarakan dalam ruang publik berperan sebagai pengecek legitim tidaknya kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah yang non-representatif dan tertutup melalui pengujian apakah kepentingan umum dari masyarakat telah diupayakan perwujudannya oleh pihak penguasa. Kemudian lambat laun ruang publik mendapatkan signifikansi yang menjulang ketika dirinya menjadi basis dari kebijakan publik itu sendiri, yaitu bahwa kebijakan publik harus berjangkar kepada kehendak rasional yang muncul dan bersirkulasi dalam debat-debat rasional di ruang publik (Thomassen, 2010: 36).

Dalam ST, Habermas menerapkan metode kritik imanen. Ini adalah metode

yang biasa dipakai para pendahulunya, yaitu generasi pertama Teori Kritis seperti Horkheimer dan Adorno. Kritik imanen merupakan cara mengkritik suatu objek, dalam hal ini ruang publik, dengan berdasarkan kepada istilah dan idealitas konsep serta nilai dari objek itu sendiri dan bukannya menggunakan nilai atau standar yang ekstern atau transenden dari objek tersebut, dengan tujuan untuk menggiring dimensi-dimensi kekurangan atau kesalahan objek tersebut kepada cahaya kebenaran atau idealitas. Para pemikir Teori Kritis mengatakan bahwa metode ini diperoleh dari Hegel dan Marx (Finlayson, 2005: 9).

Dengan meniti kepada kritik imanen inilah Habermas memperoleh saripati ideal dari konsep ruang publik untuk dijadikannya alat untuk mengkritisi penyimpangan dan disfungsi ruang publik dalam tataran empiris sejak akhir abad ke-19. Kaum borjuis menjustifikasi kekuasaan politiknya dengan menegaskan karakter universal dari sumber normatif tempat kekuasaan mereka berasal, yaitu model interaksi yang menegaskan prinsip resiprositas dan keterbukaan (Johnson, 2006: 25). Gambangnya, ruang publik borjuis sesungguhnya menyimpan ideal-ideal normatif warisan Pencerahan yang secara implisit terkandung di dalamnya: kebebasan, solidaritas, persamaan (*liberte, fraternite, egalite*). Di dalamnya, dilakukan interpretasi terhadap kebaikan umum (*common good*) yang pada akhirnya menjadi kriteria untuk menguji kemasukakalan dari klaim-klaim yang diajukan anggotanya. Secara normatif, konsep ruang publik berkisar pada gagasan kebaikan umum ini.

Lebih persisnya, Habermas mengatakan tiga ideal normatif yang inheren dalam konsep ruang publik (Habermas, 1989: 36-37). Pertama, ruang publik merupakan sejenis pergaulan sosial yang sama sekali tidak mengasumsikan

kesamaan status antarorang karena konsep status dalam ruang publik sendiri dipandang tidak memiliki signifikansi apa pun. Dalam hal ini preferensi akan kedudukan diganti oleh nilai kebijaksanaan yang setara dengan nilai persamaan setiap orang. Dalam ruang publik hal yang menduduki tempat yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain bukanlah status, pangkat, harta, atau keturunan, melainkan argumen yang lebih baik. Kedua, meskipun setiap orang memiliki kepentingan berbeda-beda yang mungkin saja dipengaruhi oleh perbedaan status, kepentingan sendiri juga dipandang tidak memiliki signifikansi. Apa yang menyatukan orang-orang yang bertemu di ruang publik adalah kesamaan akan penggunaan rasio yang berkarakter "tanpa kepentingan" (*"disinterested" interest of reason*). Artinya, justifikasi terhadap argumen yang muncul dalam ruang publik haruslah berlandas kepada kepentingan umum dan bukannya kepentingan partikular. Ketiga, ruang publik pada prinsipnya bersifat inklusif. Inklusivitas ini tercermin dari formalitas keras dari syarat untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik, yaitu setiap anggota umat manusia yang dapat menggunakan rasionalitasnya (Thomassen, 2010: 41). Prinsip-prinsip ideal tersebut bersifat konstitutif bagi ruang publik karena tegak atau runtuhnya ruang publik bersama dengan prinsip tersebut. Ruang publik di mana kelompok tertentu *eo ipso* dieksklusikan bukan sekadar ruang publik yang tidak komplet, melainkan bukan ruang publik sama sekali (Habermas, 1989: 85).

Akan tetapi dalam praktiknya, ideal-ideal tersebut tidak terejawantahkan secara nyata. Kesimpulan ini didapatkan sebagai penerapan dari metode kritik imanen sebagaimana telah dikatakan sebelumnya. Akses untuk berpartisipasi dalam ruang publik tidak setara dan inklusif karena kepemilikan properti menjadi syarat tak tertulis sebelum dapat berpartisipasi di dalamnya. Orang-orang miskin dan tak

berpendidikan secara faktual tidak dapat memasuki diskusi dalam ruang publik. Demikian juga wanita dieksklusikan darinya karena karakter patriarkal dari ruang publik memposisikan wanita di dalam ruang intim (*intimate sphere*) rumah dan keluarga. Semua ini terkait dengan konsep manusia dalam ruang publik yang sedemikian reduktif dan restriktifnya karena terbatas kepada kaum borjuis, yaitu pria kulit putih pemilik properti. Konsep manusia "dimonopoli" oleh sosok kaum borjuis karena mereka secara sepihak memandang diri mereka sebagai subyek alami dari humanitas. Kepentingan mereka dalam mempertahankan ranah pertukaran komoditas dan kerja sosial dengan demikian sesungguhnya hanyalah mencerminkan kepentingan partikular yang hanya dapat berlaku melalui penggunaan kekuatan kepada orang-orang lain (Habermas, 1989: 124-125). Jadi alih-alih mengkristalkan kebaikan umum, diskusi yang diselenggarakan di ruang publik justru hanya merepresentasikan kepentingan parsial kaum borjuis.

Selain itu, ruang publik juga bersandar kepada asumsi yang lemah tentang independensi dirinya dari negara. Pada kenyataannya negara selalu mengintervensi ruang publik pada khususnya dan masyarakat sipil pada umumnya, misalnya melalui kegiatan yudisial, pemeliharaan ketertiban, menyediakan infrastruktur, dan bahkan juga menjaga pasar dari intervensi itu sendiri melalui pemberian jaminan akan hak-hak sipil, termasuk hak akan kepemilikan properti (Thomassen, 2010: 42).

Demikianlah maka sesungguhnya ruang publik merupakan konsep yang senantiasa mengalami ketegangan. Melalui tilikan atas kondisi empiris ini, ideal-ideal ruang publik akan kesetaraan, inklusivitas, dan rasionalitas dipandang tak lebih sebagai fiksi, kemunafikan, dan ideologi semata. Akan tetapi, dalam terang ideal tersebut,

harapan akan transformasi ke arah yang lebih progresif dan mendekati harapan normatif juga selalu dinyalakan. Dengan pengertian ini, maka kritik yang sering dialamatkan kepada Habermas bahwa dia terlalu mengidealisasikan ruang publik borjuis salah alamat karena dia lebih menekankan ketegangan antara idealitas dengan fakta yang terjadi. Sekali lagi, inilah produk intelektual khas yang hanya dapat dimunculkan melalui penggunaan metode kritik imanen (Habermas, 1992: 425-429).

Diskrepansi antara yang normatif dengan yang empiris tersebut pada mulanya dapat dinetralisir dengan diintroduksinya hak pilih pada abad ke-19 dan dikembangkannya sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) pada awal abad ke-20. Namun itu semua tak cukup bertahan lama untuk menambal kebobrokan yang ada karena era yang disebut dengan kapitalisme lanjut (*late capitalism*) pada pertengahan abad ke-20 mulai menjelang. Era kapitalisme lanjut dikarakteristikkan oleh produksi ekonomi skala besar, munculnya perusahaan multinasional, dan semakin meluasnya birokratisasi kehidupan. Ini menimbulkan dampak yang merugikan bagi tumbuh berkembangnya ruang publik karena dalam atmosfer demikian, diskusi publik yang rasional menjadi kehilangan tempatnya dalam masyarakat secara keseluruhan. Rasa-kedirian kelas borjuis yang dulu ditempa melalui keahlian mengartikulasikan gagasan dan argumen bercorak publik kini menjadi luruh.

Layunya kemampuan komunikatif tersebut tercerminkan di dalam fenomena konsumsi dan politik. Apabila anggota ruang publik borjuis abad ke-18 secara rutin memperdebatkan selera konsumsi literer dan produk budayanya, kini sekarang mereka hanya melakukan pengumbaran selera melalui laku konsumsi massa. Debat rasional-kritis digantikan oleh konsumsi (Habermas, 1989: 161). Budaya massa



mengubah publik menjadi barisan konsumen yang homogen, patuh, dan tak kritis. Jika dulu dalam masa-masa awalnya ruang publik ditempati oleh pemilik properti dan produsen ekonomi, sekarang ruang publik diokupasi oleh orang-orang yang berpendapatan stabil, suatu prasyarat yang dibutuhkan untuk melakukan konsumsi secara stabil. Selera direduksi sekadar menjadi preferensi subjektif yang desisionistik dan tertutup dari diskusi rasional.

Jika dulu tidak ada distingsi yang tegas antara kaum intelektual dan orang awam karena semua orang berhak memberikan legitimasi sejauh mampu mengerahkan rasionya, kini terjadi pembagian antara mereka yang ahli dan yang tidak. Kebijakan publik dengan demikian semakin sering diserahkan kepada teknokrat tanpa mempertimbangkan legitimasi publik. Iklan juga mengerosi kemampuan berdebat masyarakat. Meskipun iklan ditujukan kepada publik, namun itu tak menjadikan terjadinya penguatan nilai-nilai publik karena publik sendiri sudah terindividualisasikan sebagai konsumen atau klien.

Ada pun dalam bidang politik kini debat publik digantikan oleh voting massa. Opini publik direduksi menjadi sekadar agregasi preferensi individual dan subjektif. Ini ditopang oleh institusi hubungan masyarakat (*public relations*) yang membodohi masyarakat secara terselubung dengan mengkreasi opini publik palsu. Partai politik massa yang bercorak birokratis dan hierarkis semakin bermunculan. Elit-elit politik memanipulasi ruang publik dengan memanfaatkannya secara sepihak sebagai sarana untuk mendatangkan legitimasi atas kepentingan dan kebijakan mereka. Isu-isu yang nyata dan substantif ditutupi oleh pilihan-pilihan simplistis yang dipromosikan oleh para petarung elektoral. Sementara itu, media massa tidak mampu memberikan pencerahan politik karena beroperasi dengan

berlandaskan pada kepentingan privat elit-elitnya seiring dengan tingginya oplah dan sirkulasi yang menyebabkan perusahaan media massa menjadi korporasi besar. Konten-kontennya semakin dipenuhi oleh cerita privat model *infotainment*. Semua fenomena yang merepresentasikan penjinakan dan pengapatisan publik secara besar-besaran tersebut dikatakan Habermas sebagai refeodalisasi ruang publik.

Pada akhir ST, Habermas mengakhiri tesis refeodalisasi dengan secongkah pesimisme yang cukup kuat. Negara yang berkoalisi dengan korporasi mampu mengebiri gejolak aktivisme akan kepublikan dengan menjadikan masyarakat sebagai kumpulan individu yang teratomisasi dan patuh. Masyarakat hampir-hampir telah teradministrasikan sepenuhnya sehingga tindakan strategis meraja. Deliberasi dan debat tak lagi menjadi keterampilan yang dibutuhkan sebab yang diperlukan hanyalah respons yang tepat dan terukur terhadap suatu impuls perilaku dari luar diri. Satu-satunya harapan untuk merevitalisasi ruang publik tertinggal pada kemungkinan untuk melakukan rasionalisasi kekuatan sosial dan politik melalui perilaku saling mengontrol antara organisasi-organisasi yang saling bersaing di mana masing-masing dari mereka haruslah berkomitmen kepada nilai-nilai kepublikan baik di dalam struktur internal mereka maupun dalam interaksinya dengan organisasi lain dan dengan negara (Habermas, 1989: 210).

Pemikiran Habermas tentang ruang publik di atas diperkaya melalui kata pengantar yang diberikan Habermas untuk terbitan baru ST tahun 1990. Di dalamnya Habermas membedakan dua jenis ruang publik dari perspektif derajat intervensi kekuasaan yang mungkin bersemayam dalam ruang publik. Pertama adalah ruang publik yang tidak dikooptasi kekuasaan, yakni ruang publik yang tumbuh dari

dunia-kehidupan (*Lebenswelt*). Kedua adalah ruang publik yang dikooptasi oleh kekuasaan sebagai ruang publik yang berorientasi pada wilayah sistem, yakni pasar dan administrasi. Masing-masing ruang publik itu dikuasai oleh aktor-aktor tertentu. Habermas menyebut para aktor dalam ruang publik yang tidak dikooptasi kekuasaan sebagai pribumi (*otokhton*) karena mereka berasal dari publik itu sendiri dan memiliki akar yang mendalam pada *Lebenswelt*. Di sisi lain, ruang publik yang dikooptasi oleh kekuasaan didominasi oleh apa yang disebut para aktor pemakai (*nutznie~~s~~end*), yakni aktor-aktor yang tidak tumbuh di dalam publik melainkan hadir di depan publik dan menduduki ruang publik di mana mereka memanfaatkan medium uang serta kuasa untuk memeralat publik. Mereka ini biasanya memiliki identitas sosial yang diakui dan mapan dalam masyarakat (dikutip dalam Hardiman, 2009: 141-142).

#### **“Between Facts and Norms”: Ruang Publik dalam Demokrasi Deliberatif**

Melalui BFN, tema ruang publik kembali mendapat sorotan luas. Buku ini ditulis hampir tiga dekade setelah ST terbit. Dalam BFN, Habermas menekankan pentingnya ruang publik dalam konteks teori diskursus tentang hukum dan demokrasi. Haluan balik kepada ruang publik ini tidak dimaksudkan untuk melakukan romantisasi yang terputus dari realitas kontemporer melainkan lebih sebagai proyek atau tugas melakukan mobilisasi aliran komunikatif yang telah ada di antara praktik sosial dan struktur institusional dalam sistem demokrasi liberal. Di dalam karya ini, sebagaimana diyakini pula oleh Staats (2004), terdapat nada yang lebih optimis tentang ruang publik dalam karya ini apabila dibandingkan dengan karya sebelumnya.

Ruang publik ditempatkan sebagai elemen dari bangunan teoretis yang komprehensif tentang demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif merupakan varian demokrasi yang memfokuskan dirinya pada isu legitimasi politik. Model demokrasi ini merupakan arus balik dari demokrasi klasik-ortodoks yang memahami ideal demokrasi melalui dalam kerangka agregasi preferensi dan kepentingan warga negara melalui sarana konvensional seperti voting dan lembaga perwakilan (Dryzek, 2000: v). Formulasi intinya adalah bahwa suatu keputusan bersifat legitim apabila keputusan tersebut memperoleh persetujuan rasional melalui partisipasi di dalam pertimbangan mendalam (*deliberation*) yang otentik oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut (Parkinson, 2006: 4).

Pada Habermas, arena untuk berpartisipasi di dalam deliberasi tersebut adalah ruang publik. Kini ruang publik tidak lagi dipandang secara konkretis, historis, dan partikular sebagaimana dalam ST. Pada sebagian, ini juga merupakan responsnya akan kritik kaum postmodern dan teoretisi “perbedaan” yang mengkritik pemahamannya akan ruang publik yang bersifat tunggal, homogen, dan mencari kebulatan suara sehingga bersifat antipluralis (Scheuerman, 2008: 90). Dalam BFN, Habermas memberikan pengakuannya akan pluralitas ruang publik. Ini adalah pengakuan yang muncul dari refleksi atas kondisi empiris masyarakat modern kontemporer yang semakin kompleks dan plural. Setiap komunitas dan kelompok dapat membentuk ruang publiknya sendiri. Secara konseptual, ruang publik dipahami sebagai jaringan yang kompleks dan terdiferensiasi namun yang mengkonstitusi dirinya sebagai “teks tunggal” dengan tujuan untuk mengamankan kapasitas individu-individu dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi atas kemasukakalan dan keadilan dari

pandangan yang mereka utarakan (Johnson, 2006: 87-88). Secara definitif, Habermas mengatakan apa yang dimaksudkannya dengan ruang publik:

*The public sphere cannot be conceived as an institution and certainly not as an organization....The public sphere can best be described as a network for communicating information and points of view....the streams of communication are, in the process, filtered and synthesized in such a way that they coalesce into bundles of topically specified public opinions* (Habermas, 1996: 360).

Untuk memahami ruang publik dengan lebih jernih, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian Habermas tentang politik itu sendiri. Habermas membedakan antara dua jenis politik, yaitu politik informal dan politik formal. Perbedaan ini diinspirasi dari perbedaan Nancy Fraser antara publik lemah dan publik kuat. Publik lemah dikarakteristikan oleh pembentukan opini yang tidak dibebani oleh tugas langsung untuk membuat keputusan formal sedangkan publik kuat adalah pihak yang dalam diskursusnya menyelenggarakan baik formasi opini maupun pembuatan keputusan. Publik kuat ini direpresentasikan terutama oleh badan legislatif (Scheuerman, 2008: 92).

Bagi Habermas, politik informal merupakan jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan sudut pandang (Habermas, 1996: 360). Di dalamnya, berlangsung diskursus yang bersifat spontan dan bebas. Melalui diskursus tersebut individu membentuk identitas mereka secara deliberatif dan terutama melancarkan opini tentang isu-isu publik. Sebagaimana telah disebutkan, politik informal ini tidak terinstitusionalisasikan dan tidak didesain untuk mengambil keputusan, melainkan mengambil peranan sebagai pelaku diskursus dan komunikasi yang disebut proses pembentukan opini individual dan kehendak (*individual opinion-and will-for-*

*mation*). Tempat di mana politik informal ini dijalankan disebut dengan ruang publik.

Karena strukturnya yang tidak terorganisasi, politik informal ini lebih rentan terhadap efek represif dan eksklusif dari distribusi kekuasaan yang tak merata, kekerasan struktural, dan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis daripada politik formal. Akan tetapi, di sisi lain politik informal juga mempunyai kelebihan yaitu menjadi medium dari komunikasi tak terbatas (*unrestricted communication*). Di dalamnya, masalah-masalah baru dapat dirasakan dengan lebih sensitif, diskursus dapat dibawa secara lebih luas dan ekspresif, identitas kolektif dan artikulasi kebutuhan dapat disuarakan tanpa mengalami tekanan yang besar sebagaimana dalam politik formal (Habermas, 1996: 307-308).

Sebagai suplemen atas politik informal adalah politik formal. Politik formal merupakan arena institusional dari komunikasi dan diskursus yang didesain secara spesifik untuk mengambil keputusan. Institusi politik formal contohnya berupa parlemen, kabinet, dan partai politik. Perlu dicatat di sini bahwa politik formal tidak identik dengan negara sebab konsep negara selain terdiri dari politik formal sebagaimana yang telah disebutkan juga terdiri atas elemen eksekutif, yudikatif, dan birokrasi.

Sistem politik berfungsi secara ideal manakala politik formal menyerap secara lancar masukan dari politik informal. Kelindan antara keduanya dijamin, misalnya, melalui hak partai politik (representasi politik formal) untuk "berkolaborasi" di dalam pembentukan kehendak politik masyarakat, sebagaimana hak (aktif maupun pasif) warganegara untuk memilik dan hak-hak partisipatoris lainnya (Habermas, 1996: 368). Dalam perumusan kebijakan publik, politik informal memegang peranan kunci. Karakter bebas dan tak terbatas dari diskursus dalam

politik informal berperan dalam mengidentifikasi, mentematisasi, dan menginterpretasi urusan-urusan publik (Scheuerman, 2008: 90).

Habermas setuju dengan John Dewey bahwa orientasi komunikasi dalam ruang publik politis mempunyai trayektorinya yang spesifik. Selain dibedakan dari kepentingan ekspresif yang melekat pada ruang publik literer, ruang publik politis juga dibedakan dari orientasi “komunikasi” dalam “politik kantor” yang menaruh perhatian kepada penguraian masalah (*problem solving*) secara pragmatis-teknis. Dalam ruang publik politis, pesertanya harus melakukan “investasi” berupa pengakuan akan keadilan dan keberterimaan klaim-klaim mereka. Dalam tahapan kebijakan publik, deskripsi masalah menjadi tanggung jawab ruang publik sepenuhnya.

Agar deskripsi masalah tersebut terbukti bersifat publik, yakni terbukti merupakan masalah bersama atau setidaknya masalah yang perlu untuk diprioritaskan penanganannya, dibutuhkan pemanfaatan secara cerdas dan efektif atas bermacam-macam mekanisme perumusan masalah (*agenda setting*). Mekanisme tersebut tidak hanya tersedia dalam institusi-institusi legal-politis, melainkan juga ada dalam ranah kultural. Media massa misalnya, dapat menjadi representasi dari gelanggang adu ide tentang masalah urgen dan pelik yang sedang dihadapi masyarakat. Media massa memainkan peranan vital sebagai kendaraan di mana definisi masalah partikular dan klaim identitas dapat meraup signifikansi publik yang lebih luas (Johnson, 2006: 89).

Legitimasi dari keputusan yang mengikat secara publik dengan demikian mensyaratkan bahwa klaim kebutuhan partikular yang diartikulasikan aktor-aktor dalam masyarakat sipil direpresentasikan dalam istilah yang mampu membuat publik yang lebih luas dan tidak ikut terlibat untuk

juga mengapresiasi rasionalitas klaim tersebut beserta alasan mengapa klaim itu harus dipenuhi. Di sini kemudian dapat dipahami mengapa kebijakan publik harus memuat “bahasa hukum”. Ini karena hukum memuat bahasa umum yang abstrak sehingga memungkinkan definisi masalah partikular diterjemahkan ke dalam terminologi yang dapat “dikerjakan” dan ditanggapi oleh pusat pembuatan keputusan politik. Keputusan yang mengikat secara kolektif haruslah diinterpretasikan sebagai realisasi dari hak-hak dalam artian bahwa struktur pengakuan yang terbangun dalam tindakan komunikatif ditransfer, via medium hukum, dari level interaksi sederhana menjadi hubungan abstrak dan anonim di antara orang-orang yang tak saling kenal (Habermas, 1996: 385).

Habermas mengatakan bahwa deskripsi isu dalam arena pinggiran, yakni ruang publik informal, dapat mempengaruhi agenda dari pusat pembuatan keputusan dalam kasus di mana “persepsi atas masalah dan situasi masalah berada pada perubahan konfliktual” (1996: 357). Artinya publik yang tidak bersetuju dapat menjalankan resonansi efektif terhadap pusat pembuatan keputusan dan akan, dalam beberapa kondisi, mampu untuk menginisiasi model penyelesaian masalah yang dapat melintasi dan melampaui model pembuatan keputusan yang rutin dan terbirokratisasikan (Johnson, 2006: 91).

Apabila perjalanan aspirasi opini publik ingin merembes ke pusat pembuatan keputusan, potensi-potensi dari ruang publik harus dimobilisasikan. Ruang publik harus mampu mendemonstrasikan “kapasitas untuk merasa, menafsir, dan menghadirkan masalah-masalah masyarakat dalam cara yang menarik perhatian dan inovatif” (Habermas, 1996: 358). Untuk mampu menggunakan kapabilitas ini dengan baik, maka ruang publik perlu diberikan peran yang luas dalam kehidupan politik. Selain

itu, ruang publik juga diharapkan tampil sebagai papan pembunyi (*sounding board*) dari masalah. Artinya ruang publik mempunyai tugas untuk merasakan, menginterpretasikan, dan mensinyalkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Agar opini publik yang diterima politik formal tidak tampil dalam bentuknya yang liar, naif, dan vulgar, maka opini publik tersebut harus ditematisasikan, diperlengkapi dengan solusi-solusi yang mungkin, dan didramatisasi seolah-olah opini publik tersebut telah diolah dan ditelaah oleh kompleks parlementer (Habermas, 1996: 359).

Ruang publik berakar sekaligus terpadatkan dalam institusi masyarakat sipil. Masyarakat sipil berbeda dengan kaum borjuis sehingga dengan demikian ruang publik yang dihidupinya secara komparatif bersifat jauh lebih inklusif dan tidak menyimpan selimut ideologis daripada ruang publik borjuis. Dalam lanskap totalitas sosial, masyarakat sipil harus dibedakan dari negara dan pasar, dan, meskipun berhubungan dengan ranah privat, juga harus dibedakan darinya (Habermas, 1996: 367-370). Di bawah beberapa kondisi, masyarakat sipil dapat mendapatkan pengaruh dalam ruang publik, memberikan efek kepada parlemen dan pengadilan melalui opini publik yang dihasilkannya, dan mendorong sistem politik untuk berpindah menuju sirkulasi kekuasaan resmi (Habermas, 1996: 373).

Masyarakat sipil terdiri atas perhimpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi, dan gerakan-gerakan yang kurang lebih bersifat spontan yang menyimak, memadatkan dan secara nyaring meneruskan resonansi keadaan persoalan kemasyarakatan di wilayah-wilayah privat ke dalam ruang publik. Ada pun inti dari masyarakat sipil terdiri dari jaringan perkumpulan-perkumpulan yang menginstitutionalisasi diskursus-

diskursus pemecahan masalah ke dalam pertanyaan tentang kepentingan umum di dalam kerangka ruang publik yang terorganisasi. Desain sedemikian pada gilirannya memiliki bentuk organisasi yang bersifat egaliter dan terbuka yang memantulkan fitur-fitur esensial dari jenis komunikasi yang mereka kristalkan (Habermas, 1996: 367).

Dalam jaringan ruang publik, perkumpulan-perkumpulan sipil merupakan konstituen yang paling penting dalam masyarakat sipil. Ini karena perkumpulan sipil dapat menjadi landasan vital dari budaya demokratis, yakni sebagai "situs sosial" di mana publik menggeneralisasikan signifikansi dari perspektif yang dimiliki dan di mana klaim-klaim partikular secara argumentatif dihela keluar. Perkumpulan sipil dengan demikian dapat menjadi variabel produktif dari ruang publik ketika tidak menggerakkan pengaruhnya kepada kebijakan publik dengan cara mengeksploitasi situs-situs kekuasaan yang ada, melainkan dengan cara memfilter dan mensintesis aliran komunikasi ke dalam "bundel-bundel opini publik yang dispesifikkan berdasarkan topik" (Habermas, 1996: 360).

Bagaimana pun, masyarakat sipil tetaplah mempunyai keterbatasannya (Habermas, 1996: 371-372). Batasan ini diperlukan bagi bekerjanya sistem demokrasi secara masuk akal. Dia dapat secara langsung mentransformasi dirinya, namun hanya dapat memberikan efek tidak langsung terhadap transformasi dari sistem politik. Masyarakat sipil hanya dapat memengaruhi personal dan pemrograman sistem politik dan pada dirinya tidak dapat menjadi lokus dari kekuatan politik (Thomassen, 2010: 120). Sekali lagi, ini karena masyarakat sipil hanyalah jaringan longgar institusi-institusi dan bukannya institusi yang terorganisasi secara hierarkis.

Media massa mempunyai peranan yang sangat vital dalam ruang publik. Dalam model demokrasi deliberatif, fungsi media massa adalah menyalurkan aliran komunikasi publik (Habermas, 1996: 307). Media massa memediasi proses-proses pembelajaran di dalam ruang-ruang publik dengan cara menyaring atau menetralisasi pengaruh-pengaruh kekuasaan negara pada ruang-ruang publik. Media massa dapat melaksanakan fungsinya dengan benar hanya jika ia bersifat independen tidak hanya dari negara dan pasar, melainkan juga dari para aktor ruang-ruang publik (Hardiman, 2009: 143).

Akan tetapi, Habermas menengarai bahwa budaya industri telah menyebabkan terjadinya peningkatan sentralisasi dalam saluran-saluran efektif komunikasi baik dalam sisi permintaan dan penawaran dari produksi media. Akibatnya, terjadi pembentukan sindrom yang berefek kepada depolitisasi komunikasi publik melalui pelaporan fakta seperti kisah kepentingan manusia (*human interest*), informasi yang bercampur dengan hiburan, pengaturan material secara berkala, dan diuraikannya hubungan kompleks menjadi fragmen-fragmen kecil (Habermas, 1996: 376-377). Selama media massa memilih untuk membawakan materi mereka dari produsen informasi yang kuat dan terorganisasi dengan baik, dan selama mereka memilih untuk merendahkan lebih daripada meningkatkan level diskursif dari komunikasi publik, isu-isu akan cenderung muncul dan ditata dari pusat alih-alih dari pinggiran (Habermas, 1996: 380).

Habermas percaya bahwa semua tren tersebut pada dasarnya merupakan pengkhianatan sistematis dari ideal normatif media massa. Media massa semestinya memahami dirinya sebagai penerima mandat dari publik yang tercerahkan yang kemauannya untuk mendengar dan kapasitasnya untuk mengkritisi diasumsi-

kan, diminta, dan dikuatkan kembali. Mereka seharusnya reseptif terhadap keprihatinan dan proposal yang muncul dari publik, membawakan isu dan kontribusi tersebut secara imparial, memperbesar kritisisme, dan mengonfrontasi proses politik dengan mengartikulasikan permintaan akan legitimasi (Habermas, 1996: 378).

## Penutup

Terdapat beberapa perbedaan dalam pemikiran Habermas tentang ruang publik sebagaimana terpapar dalam karya ST dan BFN. Perbedaan tersebut adalah wajar karena terdapat rentang waktu yang jauh ketika Habermas menulis kedua karya tersebut. Seiring dengan perjalanan waktu, pemikiran seseorang seringkali mengalami perkembangan dan perubahan, terlebih bagi seorang pemikir besar seperti Habermas yang tentu minat intelektualnya selalu bergerak dinamis.

Beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah perbedaan teknis. Dalam ST, tema ruang publik menempati posisi yang eksklusif. Maksudnya, seluruh buku tersebut ditujukan untuk mengeksplorasi pandangan tentang ruang publik. Adapun dalam BFN, tema ruang publik merupakan salahsatu di antara banyak elemen konseptual yang didiskusikan dalam keseluruhan buku. Ruang publik adalah batu bata penyusun dari teori komprehensif Habermas tentang demokrasi deliberatif.

Kedua, kajian ruang publik dalam ST dikaji dengan menggunakan pendekatan analisis yang bersifat historis. Ruang publik yang ditulis Habermas dalam teks tersebut adalah ruang publik yang muncul dalam periode kapitalisme awal di abad 17 sampai pada transformasinya di abad 18 dan 19. Meskipun memang ada yang berpendapat bahwa argumen-argumen historis yang disampaikannya lebih digunakan untuk

mendukung analisis politiknya tentang proses transformasi ruang publik (Gestrich, 2006: 415), namun setidaknya apabila dibandingkan dengan BFN, corak historis yang ada dalam ST terasa cukup kental. Analisis Habermas tentang ruang publik dalam BFN lebih bersifat filosofis karena didekati dari sudut pandang filsafat politik dan filsafat hukum.

Ketiga, pembahasan ruang publik dalam ST merujuk pada jenis ruang publik yang tunggal, yaitu ruang publik borjuis. Ruang publik dalam variasi bentuknya yang lain sama sekali tidak disinggung di dalamnya, entah karena Habermas memang sengaja mengabaikannya atau karena Habermas berpandangan bahwa ruang publik yang eksis pada masa itu hanyalah ruang publik borjuis tersebut. Hal ini berbeda dengan BFN, di mana ruang publik diakui bersifat plural. Masing-masing kelompok dan asosiasi dalam masyarakat dapat membentuk ruang publiknya sendiri-sendiri dengan ciri khas dan usungan keprihatinan masing-masing, jadi tidak hanya terbatas pada kaum borjuis semata.

Keempat, ruang publik dalam ST dipahami secara konkret-empiris, yaitu berupa sebuah ruang tertentu yang memiliki batas-batas dan aturan main tersendiri, misalnya warung kopi, klub, salon, dan *table societies*. Adapun dalam BFN, ruang publik dilihat sebagai sesuatu yang abstrak sifatnya, yaitu sebagai jaringan yang mengkomunikasikan informasi dan cara pandang yang disuarakan oleh warganegara. Ruang publik tidak lagi dipahami sebagai institusi atau organisasi, tetapi mirip dengan arena diskursif dalam pengertian Foucauldian, dalam arti sebagai suatu medan yang meskipun bersifat non-empiris namun mampu memunculkan efek-efek praktis dalam kehidupan.

Kelima, ruang publik informal sebagai ruang publik yang diangkat dalam BFN bersifat relatif lebih inklusif daripada ruang

publik borjuis yang dituliskan dalam ST. Ini karena ruang publik informal merupakan ruang publik yang berakar dan dihidupi oleh masyarakat sipil. Ruang publik informal dapat diakses oleh semua aktor di dalam masyarakat, dan karenanya ruang publik ini tidak perlu terlibat dengan kontradiksi-kontradiksi yang ditemui dalam ruang publik borjuis, terutama kontradiksi antara ideal inklusivitas dan egalitarianisme dengan kenyataan diskriminatif ruang publik yang nyata-bersifat patriarkis, rasis, dan bias kelas.

Bagaimanapun, di tengah segala perbedaan yang ada, tetap terdapat satu persamaan pokok yang melandasi diskusi tentang ruang publik yang tertuang dalam kedua karya tersebut. Keduanya secara tersirat berbagi pemahaman yang sama tentang esensi dari politik yang niscaya bersifat publik. Kepublikan di sini dipahami dalam konteks Kantian, yakni suatu proposisi bahwa politik sebagai penyelenggaraan urusan-urusan publik mesti dapat diuji dan dilegitimasi secara rasional melalui nalar publik. Apabila suatu pendapat ingin memperoleh validitas, entah apakah itu pendapat yang dilontarkan di ruang publik borjuis (ST) maupun ruang publik informal dan formal (BFN), maka pendapat tersebut haruslah lolos dalam melewati pengujian diskursus rasional. Komitmen yang persisten terhadap rasionalitas dalam politik ini dapat dipahami apabila kita mengingat bahwa Habermas merupakan seorang modernis *par excellence*, yakni seseorang yang selalu memegang teguh nilai-nilai Pencerahan dan senantiasa menyerukan bahwa proyek Pencerahan belumlah selesai sehingga perlu terus-menerus disempurnakan.

Memang, perlu dicatat bahwa optimisme yang kuat terhadap reflektivitas dan kapasitas swa-reformasi dari sistem dan institusi demokrasi yang ada sebagai penubuhan dari nilai-nilai Pencerahan tersebut mengundang kritiknya yang

tersendiri. Melalui keyakinan tersebut Habermas seolah mengunci proyek politiknya dalam horizon konseptual demokrasi liberal dengan segenap instalasi institusional dan yuridisnya. Dengan kata lain, aspirasi emansipasi yang justru semakin membludak dan variatif di era kontemporer, tak jarang dengan nada yang sifatnya revolusioner, justru digiring Habermas agar tetap berada dalam matriks demokrasi liberal. Posisi demikian, sayangnya, membawanya pada tuduhan bahwa dirinya terlalu konformis dengan demokrasi liberal. Padahal, di era ketika imajinasi global tak dapat lari dari aksioma bahwa demokrasi haruslah bersekutu dengan ekonomi pasar kapitalisme sehingga menghasilkan sistem politik yang disebut Alain Badiou (2008) sebagai kapitalo-parlementarisme, semakin terlihat secara mencolok betapa kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mempreservasi kekuatan komunikatif dari ruang publik niscaya tergerus oleh ketimpangan struktural dan deprivasi material yang didesak oleh pasar. Pada titik ini, optimisme yang berlebihan terhadap kapasitas swa-kelola dari tatanan demokrasi justru terlihat sebagai sebetuk sikap yang naif jika bukan reaksioner. Dalam kondisi demikian aktualisasi tindakan komunikatif berbasis rasio yang dijalankan di ruang publik akan gagal bahkan sebelum dimulai sebab subyek-subyek komunikatif belum mampu beranjak sepenuhnya dari ruang privat akibat adanya ketidaksetaraan kesempatan hidup yang merupakan biaya sosial dari kapitalisme. Asimetri kekuasaan yang secara ironis menjadi fitur utama dari masyarakat demokratis akan memicu kondisi di mana opini pihak yang lebih kuat akan lebih didengarkan daripada mereka yang lemah.

Selain hambatan ekonomi dan politik, kondisi lain yang menyebabkan timbulnya ketidaksetaraan komunikasi juga berasal dari aturan main terselubung di ruang

publik yang hanya mengakui gaya bicara rasional yang bersifat netral dan universal. Asumsi ini gagal memahami bahwa cara orang berbicara pada sebagiannya ditentukan oleh afiliasi kultural dan posisi sosial yang dimiliki. Kelas menengah terdidik bertindak seolah mereka mempunyai hak yang lebih untuk berbicara di ruang publik karena kata yang mereka ucapkan mengandung otoritas. Ada pun kaum kelas bawah merasa terintimidasi dengan syarat mengajukan argumen dan formalitas peraturan dalam deliberasi. Norma deliberasi mengutamakan formalitas dan generalitas. Tuturan diharapkan berproses secara runtut dari premis menuju konklusi yang menunjukkan digelarnya struktur penyimpulan secara rapi. Gaya bicara semacam ini, tidak bisa tidak, harus dipelajari dan dibiasakan. Mereka yang mampu melakukan itu menandakan bahwa dirinya menempati status sosial elit dalam masyarakat. Ini berbeda dengan gaya bicara mereka yang menduduki kelas bawah: berputar-putar, tersendat-sendat, dan tidak terstruktur (Young, 1996: 122-124).

Karena mekanisme eksklusi terselubung yang terkandung dalam norma deliberasi dalam ruang publik, Iris Young kemudian lebih memilih istilah "demokrasi komunikatif" alih-alih "demokrasi deliberatif". Model demokrasi komunikatif menyadari adanya keterikatan kultural spesifik pada praktik deliberasi tertentu dan insaf bahwa kekuasaan seringkali merasuk sampai kepada tataran bagaimana suatu tindak tutur dibawakan (Young, 1996: 123). Dalam model ini, ruang publik akan bersifat lebih inklusif karena segala jenis bentuk interaksi komunikatif diizinkan untuk turut terlibat. Argumen bukanlah satu-satunya model komunikasi politik yang berlaku sebab argumen dapat diselingi dengan bentuk komunikasi lain seperti salam, retorika, dan narasi (Young, 2000: 57-76).



Segala kritik di atas dapat menggoda para kritikus untuk berkomentar bahwa Habermas rupanya telah meninggalkan tugas mendasar yang diemban oleh tradisi Teori Kritis yang diwarisinya, yakni merumuskan gambaran masyarakat di masa depan yang lebih baik secara signifikan dibandingkan masa kini (Johnson, 2006: 96-97). Alih-alih menggariskan suatu alternatif yang berbeda sepenuhnya dengan tatanan demokratis kontemporer, perjuangan untuk meraih utopia cukup dijangkarkan ke dalam usaha untuk mereformasi dan mengoreksi negativitas struktural yang dihadapi ruang publik dan aktor-aktornya. Masyarakat yang ideal tidak perlu dicari “di luar sana”, melainkan cukup diperjuangkan secara gradual dengan berjejak pada prinsip “kini dan di sini” (*hic et nunc*). Meskipun barangkali terdengar konservatif di mata pemikir politik yang lebih radikal dan antagonistik, proposal Habermas tentang pelembagaan, rekonstruksi, dan revitalisasi ruang publik sesungguhnya mengisyaratkan sikap realistis yang diiringi dengan kebijaksanaan yang dalam. Kita telah melihat bahwa berbagai retorika perombakan tatanan secara totalistis dalam perjalanan sejarah politik dunia seringkali justru berakhir dalam kejumudan atau bahkan tragedi. Jika mengingat bahwa para pendahulu Habermas dari Teori Kritis generasi pertama seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Walter Benjamin mengalami jalan buntu dalam usahanya untuk merumuskan teori yang memandu proses emansipasi politik, formulasi Habermas, dengan segala keterbatasannya, sesungguhnya terasa jauh lebih masuk akal dan memberi harapan.

## Daftar Pustaka

- Arendt, Hannah. (1958). *The Human Condition*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Aristotle. (1992). *The Politics*, T.A. Sinclair (terj.). London: Penguin Books.
- Badiou, Alain. (2008). *Conditions*, Steven Corcoran (terj.). London & New York: Continuum.
- Calhoun, Craig. (2010). The Public Sphere in the Field of Power. *Social Science History* 34 (3): 301-335.
- Dryzek, John S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. New York: Oxford University Press.
- Finlayson, James Gordon. (2005). *Habermas: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Fraser, Nancy. (1992). ‘Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy’. Dalam Craig Calhoun (Ed). *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Gestrich, Andreas. (2006). The Public Sphere and the Habermas Debate. *German History* 24 (3): 413-430.
- Habermas, Jürgen. (1989). *The Structural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into Category of Bourgeois Society*, Thomas Burger (terj.). Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jürgen. (1992). ‘Further Reflections on Public Sphere.’ Dalam Craig Calhoun (Ed). *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Habermas, Jürgen. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, William Rehg (terj.). Cambridge: MIT Press.

